

PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH : DASAR TEORI, KONSEP OPERASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKTOR PERTANIAN

Adi Setiyanto dan Bambang Irawan

PENDAHULUAN

Pembangunan berdimensi wilayah secara umum sering disebut pembangunan ekonomi regional dalam konteks perekonomian makro, misalnya pembangunan ekonomi daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Dalam konteks operasional pembangunan berdimensi wilayah terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan pada kawasan tertentu yang merupakan wilayah pembangunan.

Konsep wilayah dapat diklasifikasikan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional dan wilayah perencanaan. Wilayah homogen adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya faktor-faktor dominan yang homogen pada suatu wilayah tertentu. Wilayah fungsional diklasifikasikan berdasarkan fungsinya yang memiliki keterkaitan, ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatuan. Adapun konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut, yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah, sehingga pembangunan di wilayah tersebut perlu dilaksanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Pembangunan yang memperhatikan hal-hal yang demikian dikenal dengan istilah pembangunan berdimensi wilayah, yang berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku, konsep wilayah tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk kawasan.

Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (UU 26/2007) wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Kegiatan pembangunan ekonomi bertumpu pada kawasan budidaya. Selain itu terdapat undang-undang terkait lainnya seperti UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Keempat undang-undang tersebut memiliki kesamaan visi pembangunan nasional, yaitu: (1) berlandaskan pada azas ekonomis, efisien, efektif dan transparan; (2) berbasis kinerja yang berorientasi *outcome*; (3) berhorizon pengeluaran jangka menengah; (4) berdimensi wilayah; (5) dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah; (6) dirancang dengan mengakomodasi pendekatan politik, *top-down policy* dan *bottom-up planning*; dan (7) disusun secara teknokratis dan berbasis pada penataan ruang.

Dalam konsep tata ruang dan wilayah kawasan budidaya merupakan basis kegiatan pembangunan ekonomi yang dibagi kedalam tujuh kawasan yaitu (1) kawasan peruntukan hutan produksi; (2) kawasan peruntukan pertanian; (3) kawasan peruntukan pertambangan; (4) kawasan peruntukan permukiman; (5) kawasan peruntukan industri; (6) kawasan peruntukan pariwisata; dan (7) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. Dalam konsep tersebut pembangunan pertanian ditempatkan pada kawasan peruntukan pertanian.

Tulisan ini mengungkapkan konsep-konsep pembangunan pertanian berbasis wilayah. Tiga aspek yang diungkapkan meliputi : dasar teori yang menjadi landasan pembangunan berbasis wilayah, konsep operasional pembangunan berbasis wilayah yang diterapkan di Indonesia, dan implementasi pembangunan berbasis wilayah pada sektor pertanian.



DASAR TEORI PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH

Teori lokasi merupakan salah satu teori yang melandasi perlunya pembangunan berbasis wilayah. Landasan yang digunakan dalam teori lokasi adalah mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Didalam setiap ruang terdapat banyak lokasi kegiatan ekonomi yang menggambarkan posisi kegiatan ekonomi tertentu pada ruang tersebut. Diantara lokasi suatu kegiatan ekonomi terdapat jarak terhadap kegiatan ekonomi di lokasi lainnya dan manakala suatu aktivitas ekonomi dengan aktivitas ekonomi lainnya saling berhubungan maka berbagai konsekuensi akan timbul, misalnya munculnya biaya transportasi angkutan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Prinsip dari teori lokasi adalah menata lokasi seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu ruang sedemikian rupa agar seluruh ruang yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Teori lokasi berkembang sejak awal abad 19 dan dalam perkembangan selanjutnya hingga kini telah mengalami banyak penyempurnaan. Sekalipun ada banyak tokoh baik pada awal perkembangan, maupun yang muncul belakangan, namun dapat dinilai bahwa terdapat tiga tokoh yang menonjol sebagai pelopor atau pencipta landasan teori lokasi. Ketiga tokoh tersebut adalah von Thunen, Weber dan Christaller. Tokoh yang muncul belakangan pada umumnya memperdalam atau memodifikasi salah satu teori atau menggabungkan pandangan dari tiga tokoh tersebut.

Teori von Thunen menerangkan berbagai jenis kegiatan pertanian dalam arti luas yang berkembang disekeliling daerah perkotaan yang merupakan pasar komoditi pertanian tersebut. Ide pokok dari teori Von Thunen adalah : (1) Petani yang berada di lokasi jauh dari pusat pasar atau kota, harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menjual hasil panennya. Hal ini menunjukkan betapa mahalnnya kota sebagai pusat pasar. (2) Harga sewa lahan pertanian akan berbeda-beda nilainya tergantung pada tata guna lahannya. Lahan yang berada di dekat pusat pasar atau kota akan lebih mahal dibanding lahan yang jauh dari pusat pasar karena jarak yang makin jauh dari pusat pasar akan meningkatkan biaya transportasi. Teori von Thunen menjadi acuan penting dalam pengembangan wilayah terutama dalam menentukan berbagai kegiatan perekonomian. Berdasarkan teori ini dapat ditentukan berbagai zona kawasan termasuk kawasan pertanian.

Alfred Weber pada tahun 1909 melakukan analisis tentang lokasi kegiatan industri. Menurut teori Weber pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimalisasi biaya. Weber menyatakan bahwa lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja di mana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Menurut Weber ada tiga faktor yang mempengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku, Weber menggunakan konsep segitiga lokasi atau *locational triangle* untuk memperoleh lokasi optimum. Untuk menunjukkan apakah lokasi optimum tersebut lebih dekat ke lokasi bahan baku atau pasar, Weber merumuskan indeks material (IM), sedangkan biaya tenaga kerja sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lokasi industri dijelaskan Weber dengan menggunakan sebuah kurva tertutup (*closed curve*) berupa lingkaran yang dinamakan isodapan (*isodapane*).

Dalam menentukan lokasi industri, terdapat tiga faktor penentu, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan dampak *aglomerasi* dan *deaglomerasi*. Biaya transportasi diasumsikan berbanding lurus dengan jarak yang ditempuh dan berat barang, sehingga titik terendah biaya transportasi menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi akan bertambah secara proporsional dengan jarak. Titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku (input) dan distribusi hasil produksi (output). Dipandang dari segi tata guna lahan model Weber berguna untuk merencanakan lokasi industri dalam rangka



mensuplai pasar wilayah, pasar nasional dan pasar dunia. Dalam model ini, fungsi tujuan biasanya meminimumkan ongkos transportasi sebagai fungsi dari jarak dan berat barang yang harus diangkut (input dan output). Model ini memiliki kelemahan terutama pada asumsi biaya transportasi dan biaya produksi yang bersifat konstan, dan tidak memperhatikan faktor lain seperti adanya pengaruh faktor kelembagaan dan terlalu menekankan pada posisi lokasi input.

Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Teori Christaller dikenal dengan dengan teori model tempat sentral (*central place model theory*). Christaller mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang mendukung pusat kota. Pusat kota tersebut ada karena untuk berbagai jasa penting harus disediakan tanah/lingkungan sekitar. Secara ideal maka kota merupakan pusat daerah yang produktif. Dengan demikian apa yang disebut tempat sentral adalah pusat kota. Berdasarkan prinsip aglomerasi, ekonomi kota besar menjadi pusat daerahnya sendiri dan pusat kegiatan kota yang lebih kecil. Artinya, kota kecil bergantung pada tersedianya dan adanya kegiatan yang ada pada kota besar. Oleh karena itu, apabila orang yang berada di luar kota besar ingin membeli sesuatu dapat membeli di toko sekitar tempat tinggalnya. Dalam hubungan antara kota dengan rumah tinggal, Christaller mengatakan bahwa rumah tangga memaksimalkan kegunaan atau kepuasan dalam rangka pemilihan tempat tinggal atau pemukiman.

Teori Christaller merupakan salah satu teori yang dianggap memiliki kelebihan dimana salah satu hal penting yang banyak dibahas dalam teori lokasi adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki daya tarik tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Berkaitan erat dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Namun demikian kritik juga muncul, dimana hal-hal sebagai berikut tidak menjadi pertimbangan dalam teori ini, yaitu : (1) jangkauan suatu barang dan jasa tidak ditentukan lagi oleh biaya dan waktu, dan (2) adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan konsumen tidak selalu memilih tempat pusat yang paling dekat. Hal ini dapat disebabkan oleh daya tarik atau fasilitas sarana dan prasarana tempat pusat yang lebih jauh tersebut lebih besar dibandingkan dengan tempat pusat yang terdekat.

Pada sisi lain Hyot (1939) mengemukakan bahwa perkembangan kota terjadi melalui jalur-jalur sektor tertentu. Sebagian besar daerah kota terletak pada beberapa jalur atau sektor dengan tarif sewa tinggi, sebagian lainnya pada jalur dengan tarif sewa rendah yang terletak di daerah pinggiran kota. Menurut Hyot kecenderungan penduduk untuk bertempat tinggal adalah pada daerah-daerah yang dianggap nyaman dalam arti luas. Nyaman dapat diartikan dengan kemudahan-kemudahan terhadap fasilitas, kondisi lingkungan baik alami maupun non alami yang bersih dari polusi baik fisik maupun nonfisikal, prestise yang tinggi dan lain sebagainya. Teori Hyot selanjutnya dikenal sebagai teori sektoral. Spillane dan Wan, (1993) menyatakan dalam perkembangan selanjutnya daerah-daerah dengan tarif sewa tinggi bergerak keluar sepanjang sektor atau dua sektor tertentu.

August Losch (1954) merupakan orang pertama yang mengembangkan teori lokasi dengan segi permintaan sebagai variabel utama dengan memperhitungkan baik harga produk dan berapa biaya untuk memproduksinya. Losch mengungkapkan bahwa lokasi penjual sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjual, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Losch cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Teori lokasi dari Losch ini berbeda dengan teori



Weber dimana Losch lebih melihat persoalan dari sisi permintaan (pasar) sedangkan Weber lebih mengarah kearah sisi penawaran (produksi). Teori ini bertujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga diketemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Losch berpendapat bahwa dalam lokasi industri yang tampak tak teratur dapat diketemukan pola keberaturan.

Pada teori Losch, wilayah pasar dapat berubah ketika terjadi perubahan harga dan inflasi. Hal ini karena produsen tidak selalu mampu memenuhi permintaan ketika terjadi inflasi yang akan mengakibatkan biaya transportasi naik sehingga harga jual produk juga naik. Konsekuensinya adalah pembelian oleh konsumen semakin berkurang dan konsumen berpaling ke penjual lain yang menawarkan harga lebih murah. Hal ini lebih lanjut akan mendorong petani lain di daerah melakukan proses produksi yang sama untuk melayani permintaan yang belum terpenuhi. Proses tersebut pada akhirnya menyebabkan batas daerah pasar satu dengan pasar lainnya lebih berkesinambungan dan saling terkait.

Kontribusi utama Losch adalah memperkenalkan potensi permintaan (*demand*) sebagai faktor penting dalam lokasi industri, lalu yang kedua adalah kritik terhadap pendahulunya yang selalu berorientasi pada biaya terkecil yang mana biasanya yang dilakukan oleh industri adalah memaksimalkan keuntungan (*profit – revenue maximation*) dengan berbagai asumsi serta pemikirannya, Losch mengemukakan bahwa bagaimana proses *economic landscape* terjadi, yang merupakan keseimbangan (*equilibrium*) antara *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran). Perdagangan baru terjadi bila terdapat kelebihan produksi. Dan pada akhirnya, teori ini akan mendorong pabrik setiap tahunnya akan mencari lokasi yang dapat menguasai wilayah pasar seluas-luasnya. Dalam hal ini, di harapkan pula tidak adanya pabrik lain di wilayah yang sama menghasilkan barang yang sama pula, karena akan mengurangi pendapatan. Oleh karena itu, dalam teori ini terdapat kecenderungan bahwa pabrik di bangun secara merata dan saling bersambungan sehingga membentuk heksagonal.

Tokoh lainnya yang menjadi pengembang teori lokasi diantaranya adalah Smith (1981); McGrone (1969); Isard (1956) dan Richardson (1969). Smith (1981) memperkenalkan teori lokasi memaksimalkan laba dengan menjelaskan konsep *average cost* (biaya rata-rata) dan *average revenue* (penerimaan rata-rata) yang terkait dengan lokasi. Dengan asumsi jumlah produksi adalah sama maka dapat dibuat kurva biaya rata-rata (per unit produksi) yang bervariasi dengan lokasi. Selisih antara *average revenue* dikurangi *average cost* yang tertinggi menunjukkan lokasi yang memberikan keuntungan maksimal.

Namun demikian McGrone (1969) berpendapat bahwa teori lokasi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan sulit ditangani dalam keadaan ketidakpastian yang tinggi dan dalam analisis dinamik. Ketidaksempurnaan pengetahuan dan ketidakpastian biaya dan pendapatan di masa depan pada tiap lokasi, biaya relokasi yang tinggi, preferensi personal, dan pertimbangan lain menyebabkan model maksimisasi keuntungan lokasi sulit dioperasikan. Isard (1956), mengemukakan bahwa masalah lokasi merupakan penyeimbangan antara biaya dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda dan menekankan pada faktor-faktor jarak, aksesibilitas, dan keuntungan aglomerasi sebagai hal yang utama dalam pengambilan keputusan lokasi. Richardson (1969) mengemukakan bahwa aktivitas ekonomi atau perusahaan cenderung berlokasi pada pusat kegiatan sebagai usaha untuk mengurangi ketidakpastian dalam keputusan yang diambil guna meminimumkan risiko. Dalam hal ini, baik kenyamanan (*amenity*) maupun keuntungan aglomerasi merupakan faktor penentu lokasi yang penting, yang menjadi daya tarik lokasi karena aglomerasi bagaimanapun juga menghasilkan konsentrasi industri dan aktivitas lainnya.

Pada sisi lain Sim (1982) mengemukakan bahwa faktor pengaruh yang membagi kawasan perdagangan pusat kota adalah aksesibilitas dan keterkaitan spasial. Morill (1982) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi kegiatan perdagangan adalah: (1) sebaran spasial atau geografis, yang berkaitan dengan karakteristik seperti ruang, jarak, aksesibilitas, ukuran, bentuk, aglomerasi dan posisi relatif lokasi dalam keseluruhan;



(2) faktor-faktor lainnya yaitu ekonomi, politik, budaya sehingga saling berpengaruh antara faktor spasial dan aspasial. Selain itu juga perlu diperhatikan konsumen. Dalam interaksi ekonomi keterkaitan integrasi spasial yang sangat penting adalah adanya jaringan pasar melalui pelayanan komoditi, bahan baku yang berinteraksi antara pusat perdagangan dengan permukiman. Karena kota lebih banyak berfungsi sebagai tempat pemasaran maka kota merupakan penghubung utama bagi masyarakat kota dan masyarakat *hinterland* dalam menerima serta melayani sistem pasar produksi *hinterlandnya* atau sebaliknya. Pada umumnya jika ada aksesibilitas bagi pembeli maupun pedagang, maka pasar yang diciptakan oleh adanya aktifitas perekonomian akan berkembang karena dibutuhkan oleh masyarakat.

Teori "Land Rent"

Salah satu ciri penting dalam pengembangan kawasan pertanian adalah dibutuhkannya hamparan lahan yang luas dan memenuhi skala ekonomi. Hamparan lahan ini memiliki posisi yang bervariasi terhadap pusat pasar di mana produk pertanian dapat dipasarkan dan input produksi dapat diperoleh. Pengembangan kawasan pertanian harus memperhitungkan lokasi relatifnya terhadap pusat pasarnya agar posisinya relatif efisien dalam arti memberikan ongkos transport total per satuan unit produk terendah. Hal ini penting untuk mengembangkan konfigurasi ruang pertanian yang efisien sehingga pengembangan wilayah pertanian dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat konsumen dan rumah tangga pertanian.

Disamping teori lokasi, teori lain yang terkait dengan pengembangan berbasis wilayah adalah teori *land rent* atau teori sewa lahan yang dikembangkan oleh Ricardo. Teori sewa ekonomi (*economic rent*) atau sewa lokasi (*location rent*) menyebutkan bahwa: (1) kota hanya mempunyai satu pusat; (2) kota terletak pada daerah yang datar/dataran (*flat feature less plant*); (3) ongkos transportasi sesuai dengan jarak untuk ditempuh ke segala arah, biaya transportasi menuju ke pusat kota meningkat apabila jaraknya makin jauh dari pusat kota. Pusat Kota dianggap sebagai daerah yang mempunyai derajat dan ketergantungan yang paling tinggi, makin kearah luar makin rendah derajat aksesibilitasnya; (4) setiap jengkal lahan akan dijual kepada penawar tertinggi. Hal ini berarti bahwa semua pihak mempunyai kesempatan sama untuk memperoleh lahan, tidak untuk memonopoli dalam "*land market*" baik ditinjau dari pembeli maupun penjual. Disamping itu tidak ada campur tangan pemerintah (*government intervention*) dalam ekonomi pasar, tidak ada pembatasan-pembatasan dalam kaitannya dengan "*land use zoning*" atau standar polusi lingkungan dan "*free market competition*" berjalan baik.

Barlow (1978) menggambarkan hubungan antara nilai *land rent* dan alokasi sumber daya lahan diantara berbagai kompetisi penggunaan kegiatan sektor komersial. Sektor yang memiliki nilai komersial tinggi cenderung berlokasi pada kawasan strategis yang memiliki nilai *land rent* yang tinggi. *Land rent* diartikan sebagai *locational rent*. Lahan termasuk didalamnya lahan sawah yang dalam kegiatan produksi merupakan salah satu faktor produksi tetap. Barlow mengemukakan bahwa nilai rent sumber daya lahan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) sewa kontrak (*contract rent*); (2) sewa lahan (*land rent*); (3) nilai rent ekonomi dari lahan (*economic rent*) sama dengan surplus ekonomi merupakan kelebihan nilai produksi total diatas biaya total.

Menurut Anwar (1990) suatu lahan sekurang-kurangnya memiliki empat jenis rent, yaitu: (1) *ricardian rent*, menyangkut fungsi kualitas dan kelangkaan lahan; (2) *locational rent*, menyangkut fungsi aksesibilitas lahan; (3) *ecological rent*, menyangkut fungsi ekologi lahan; (4) *sociological rent*, menyangkut fungsi sosial dari lahan. Umumnya *land rent* yang merupakan cermin dari mekanisme pasar hanya mencakup *ricardian rent* dan *locational rent*,

sedangkan *ecological rent* dan *sociological rent* tidak sepenuhnya terjangkau mekanisme pasar.

Konsep yang menyangkut pengertian tentang '*rent*' dalam ekonomi pada mulanya memang berhubungan dengan sumber daya lahan/tanah; tetapi kemudian pengertiannya diperluas kepada pemakaian istilah *rent* untuk sumber-sumber daya ekonomi lainnya (Anwar, 1994). Pengertian rent ini, dapat ditinjau antara lain menurut pemikiran mazhab klasikal, neo-klasikal dan modern. Para ekonom pada dasarnya mempunyai kesamaan pendapat tentang dapat dipajaknya sumber daya lahan kepada pemiliknya berdasarkan rente yang terdapat padanya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada prinsipnya pungutan pajak tersebut dapat dikenakan pada sumber daya lahan berdasar kelebihan (*surplus*) keuntungan yang diperoleh pemiliknya apabila lahan tersebut digunakan dalam kegiatan produksi; dan surplus tersebut disebut rente lahan atau *land rent*.

Menurut Anwar (1994), penyebab dari Ricardo sampai melupakan aspek '*absolute rent*' ini, karena jenis rent ini tidak cocok dengan teori Ricardo secara keseluruhan, sedangkan pengertian rent dalam teori Ricardo hanya merupakan bagian dari pembahasan teori besarnya yang menyangkut teori nilai (*the theory of value*) yang pada dasarnya bersumber dan berlandaskan kepada nilai tenaga kerja (*labor theory of value*). Menurut teori ini setiap objek yang mempunyai nilai, nilai ini berasal dari kandungan curahan tenaga kerja yang diberikan untuk memperoleh objek tersebut. Adanya kenyataan bahwa sumber daya lahan mempunyai nilai, tanpa mempunyai curahan tenaga kerja, merupakan alasan utama dari Karl Marx yang mendorongnya untuk membedakan rente lahan secara mutlak.

Menurut Anwar (1994), Teori *Land Rent* menurut Ricardo pada dasarnya dibangun berdasarkan pada perbedaan kesuburan lahan yang dikenal dengan *Ricardian Rent*. Dalam perumusan teorinya Ricardo menekankan pada *land rent* bidang pertanian. Asumsi yang digunakan dalam teori Ricardo adalah pada suatu daerah yang subur dimana lahan tersebut hanya digunakan untuk bertani dan mencukupi kebutuhan penduduk (*subsistence*), tidak ada *rent* yang diterima. *Rent* akan muncul jika terjadi penambahan jumlah penduduk dan peningkatan permintaan terhadap lahan yang mengakibatkan digunakannya lahan yang tidak subur. Sehingga nilai rent lahan dipengaruhi oleh kualitas lahan. Kualitas lahan yang tercermin dari besarnya surplus yang dihasilkan oleh sebidang lahan yang bersangkutan itu timbul karena lahan yang baik semakin lama menjadi semakin langka. Derajat kualitas lahan dibedakan menurut mutunya yang dicerminkan oleh tingkatan nilai lebih (*surplus*) yang disebut rent, yaitu sejumlah keuntungan yang harus dikembalikan kepada pemilik lahan, di luar biaya-biaya produksi dan manajemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka pandangan Ricardo seperti disebutkan diatas agak berbeda dengan pendapat Von Thunen. Menurut Von Thunen nilai land rent bukan hanya ditentukan oleh kesuburan lahan (Ricardian rent) atau iklim, tetapi nilai "*Land Rent*" merupakan fungsi dari lokasinya, dimana perbedaan rent ini lebih ditentukan oleh biaya-biaya transfernya. Von Thunen memandang bahwa lahan pada jarak tertentu dari kota merupakan sebagai kesatuan yang serba-sama. Oleh karena itu Von Thunen lebih memperhatikan pentingnya lokasi dari pada aspek kesuburan lahan. Menurut Von Thunen dalam kawasan (kota) tertutup yang tunggal, kawasan kota diasumsikan dikelilingi oleh lahan yang kualitasnya serba-sama (*uniform*). Tataguna lahan yang dihasilkan akan merupakan cincin-cincin lingkaran yang bentuknya konsentris yang mengelilingi kota.

Barlowe (1978) memiliki pandangan yang lain lagi mengenai rente lahan atau *land rent*. Menurut Barlowe, *land rent* mengandung dua pengertian yaitu *contract rent* dan *economic rent* atau juga sering dinyatakan sebagai *land rent*. *Contract rent* mengandung pengertian nilai sewa tanah, yaitu nilai pembayaran dari penyewa tanah kepada pemilik dalam jangka waktu tertentu. *Economic rent* atau *land rent* mengandung pengertian surplus ekonomi (*economic surplus*) atau surplus pendapatan (*income surplus*) di atas biaya atau

harga input tanah yang dimanfaatkan dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme alokasi sumber daya tanah lebih banyak ditentukan oleh nilai *economic rent* atau *land rent* dan bukan nilai sewa atau *contract rent*. Dengan kata lain pergeseran alokasi lahan termasuk konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian akan sangat ditentukan oleh nilai *economic rent* atau *land rent*. Berdasarkan pertimbangan ini, maka lahan yang mempunyai nilai *land rent* yang lebih besar akan menggusur penggunaan lahan yang memiliki *land rent* lebih kecil.

Pada umumnya *land rent* dari berbagai kegiatan dapat diurutkan sebagai berikut (Barlowe, 1978): Industri>Perdagangan>Pemukiman>Pertanian Intensif>Pertanian Ekstensif. Berdasarkan urutan tersebut maka dapat diperkirakan bahwa jika alokasi lahan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan *land rent* merupakan cerminan dari manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari kegiatan eksploitasi lahan maka konversi lahan pertanian ke penggunaan sektor lain akan sulit dihindari. Berbagai kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *land rent* lahan pertanian, khususnya lahan sawah, memang jauh lebih rendah dibanding *land rent* lahan yang digunakan untuk kegiatan lain. Oleh karena itulah, salah satu aspek penting dalam penetapan kawasan pertanian adalah komitmen perlindungan kawasan pertanian baik dalam Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan tertuang dalam Rencana Umum Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH

Berbagai konsep pembangunan berdimensi wilayah telah berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas (2006) berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan diantaranya adalah: (1) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; (2) konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; (3) konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal; (4) konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Klaster yang berhasil adalah klaster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal.

Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumber Daya

Pengembangan wilayah sesungguhnya merupakan program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan, yang didasarkan atas sumber daya yang ada dan kontribusi pada pembangunan suatu wilayah tertentu. Dengan demikian dalam mengembangkan suatu wilayah diperlukan pendekatan-pendekatan tertentu yang disesuaikan dengan karakteristik daerah yang bersangkutan. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya, memiliki berbagai pendekatan diantaranya yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis sumber daya; (2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan.

Pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya menghasilkan sejumlah pilihan strategi sebagai berikut : (a) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia; (b) Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam; (c) Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen; dan (d) Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam. Pada pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya manusia, memberikan gambaran bahwa

suatu memiliki SDM yang cukup banyak namun lahan dan SDA terbatas maka *labor surplus strategy* cukup relevan untuk diterapkan. Tujuan utama strategi ini adalah menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya dan mengupayakan ekspor tenaga kerja ke wilayah lain. Pengembangan wilayah berbasis input namun surplus sumber daya alam menunjukkan kondisi dimana berbagai SDA yang mengalami surplus yang dapat diekspor ke wilayah lain baik dalam bentuk bahan mentah maupun bentuk setengah jadi. Hasil dari ekspor SDA ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengimpor produk yang jumlahnya sangat terbatas di wilayah tersebut, misalnya barang modal, bahan baku, bahan penolong, barang konsumsi, dan jasa. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya modal dan manajemen mengarahkan pada strategi pengembangan wilayah didasarkan atas pengembangan lembaga keuangan yang kuat dan pengembangan sistem manajemen yang baik, yang dapat ditempuh oleh wilayah yang memiliki keterbatasan dalam hal modal dan manajemen tersebut. Pengembangan wilayah berbasis seni budaya dan keindahan alam memberikan arah bahwa wilayah dengan potensi-potensi pantai dan pemandangan yang indah, seni dan budaya yang menarik dan unik, dapat mengembangkan wilayahnya dengan cara membangun transportasi, perhotelan dan restoran, industri-industri kerajinan, pelayanan travel, dan lainnya yang terkait dengan pengembangan kepariwisataan.

Pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan menekankan pada pilihan komoditas unggulan suatu wilayah sebagai motor penggerak pembangunan, baik di tingkat domestik maupun internasional. Sedangkan, pengembangan wilayah berbasis efisiensi menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi yang porsinya lebih besar dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Pembangunan ekonomi ini dilaksanakan dalam kerangka pasar bebas/pasar persaingan sempurna. Pada pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan menekankan, maka peranan setiap pelaku pembangunan menjadi fokus utama dalam pengembangan wilayah konsep ini. Pelaku pembangunan ekonomi tersebut dapat dipilah menjadi lima kelompok yaitu: usaha kecil/rumah tangga, lembaga sosial, lembaga keuangan, koperasi, dan pemerintah.

Konsep Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang

Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang (spasial) merupakan konsep pembangunan wilayah dengan menggunakan pendekatan penataan ruang wilayah. Di Indonesia, pendekatan ini diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang dirinci kedalam wilayah provinsi dan kabupaten. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, membagi wilayah ke dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi. Ketiga hal ini menjadi dasar pengembangan wilayah berbasis penataan ruang.

Pusat Pertumbuhan berkembang mulai dasawarsa pertama pertengahan abad ke-20 yang diawali muncul teori-teori yang menyatakan pentingnya peranan pusat-pusat pertumbuhan atau pembangunan, diantaranya adalah teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) yang dikemukakan oleh Francois Perroux, teori kutub pertumbuhan yang terlokalisasi (*localized development pole theory*) yang dikemukakan oleh Boudeville, serta teori titik pertumbuhan (*growth point theory*) yang dikemukakan oleh Albert Hirschman. Menurut teori-teori tersebut, peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama atau lokomotif pertumbuhan, yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Dalam hubungan dengan penyebaran dampak pertumbuhan ke wilayah di sekitarnya, Albert Hirschman telah memperkenalkan istilah *trickling down effect* atau dampak tetesan ke bawah. Melalui konsep ini, pembangunan wilayah dilancarkan melalui pusat-pusat pertumbuhan yang pada umumnya merupakan kota-kota besar. Peranan investasi skala besar sebagai *external force* sangat dibutuhkan untuk mengembangkan sektor industri, perbankan dan keuangan, properti, dan

lainnya. Infrastruktur dan utilitas perkotaan yang lengkap mendorong mengalirnya Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang digerakkan secara sentralistik oleh perusahaan-perusahaan korporasi skala besar. Beberapa penerapan konsep ini di Indonesia adalah pengembangan KAPET, Kawasan Andalan, dan sebagainya.

Konsep Integrasi Fungsional merupakan alternatif pendekatan yang mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara sengaja di berbagai pusat pertumbuhan karena adanya konsep yang komplementer. Konsep ini berargumentasi bahwa suatu wilayah memiliki hirarki. Konsep *center periphery* yang diintegrasikan secara fungsional agar terjadi ikatan yang kuat ke depan maupun ke belakang dari suatu proses produksi merupakan pengembangan dari konsep ini. Sementara itu, konsep desentralisasi merupakan pendekatan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan pada penerapan konsep pusat pertumbuhan. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dapat menyebabkan terjadinya *backwash effect* yang merugikan wilayah-wilayah *periphery*. Pendekatan desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumber daya modal dan sumber daya manusia.

Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu

Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. Daerah atau wilayah yang tertinggal adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah atau wilayah lain dalam skala nasional. Untuk menentukan daerah-daerah yang tertinggal, terdapat berbagai indikator yang digunakan. Kementerian PDT menggunakan lima indikator sebagai dasar penentuan daerah tertinggal di Indonesia antara lain (1) Perekonomian masyarakat; (2) Sumber daya manusia; (3) kemampuan finansial; (4) Aksesibilitas; dan (5) karakteristik geografis. Berdasarkan indikator tersebut, setidaknya terdapat 199 daerah yang tergolong kepada daerah tertinggal di Indonesia (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, 2004).

Ketertinggalan suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain : (a) Faktor Kondisi Geografis, karena pada umumnya daerah tertinggal sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan transportasi dan media komunikasi; (b) Faktor Kondisi Sumber Daya Alam, karena beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumber daya alam memadai. Ada daerah yang memiliki SDA besar namun lingkungan di sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi. Namun ada pulau ketertinggalan yang disebabkan karena rusaknya lingkungan hidup; (c) Faktor Sumber Daya Manusia karena pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah; (d) Faktor Sarana dan Prasarana karena Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial; (e) Faktor Bencana dan Konflik Sosial karena seringkali suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi; (f) Faktor Kebijakan karena adanya ketertinggalan suatu daerah disebabkan pula oleh kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Pengalaman menunjukkan bahwa konsep pusat pertumbuhan yang selama ini diterapkan telah menyebabkan terjadinya ketimpangan wilayah antara pusat pertumbuhan dengan wilayah-wilayah pengaruhnya. Dampak tetesan ke bawah yang diharapkan tidak terbukti bekerja dengan baik. Gejala ini disebabkan karena pusat pertumbuhan yang umumnya merupakan kota-kota besar sebagai pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial memiliki pengaruh eksploitatif yang kuat terhadap wilayah

pengaruhnya. Terjadi tarikan urbanisasi dari desa-desa dalam wilayah pengaruh ke pusat pertumbuhan atau terjadi dampak polarisasi. Dampak polarisasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap wilayah pengaruh yang oleh Gunnar Myrdal disebut *backwash effect*. Akibatnya, wilayah pengaruh tidak berkembang baik secara fisik maupun non-fisik. Orientasi pembangunan pada pusat pertumbuhan yang cenderung sentralistik ini telah mengabaikan peranan dan potensi pelaku pembangunan di daerah.

Kebijakan yang kurang tepat juga dapat dilihat di daerah-daerah perbatasan, yang tidak berkembang karena dominannya kebijakan keamanan dibandingkan orientasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan keamanan dan gerakan separatisme yang menyebabkan kegiatan pembangunan terabaikan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing daerah-daerah tertinggal adalah dengan mengembangkan perekonomian lokal. Lokal atau lokalisasi dikonotasikan dengan suatu area yang relatif terbatas, dimana pemanfaatan berbagai sumber daya alam, manusia, sosial, fisik, teknologi, dan kelembagaan dapat ditingkatkan lebih intensif dan interaktif untuk meningkatkan kegiatan perekonomian lokal dan tingkat kehidupan masyarakat lokal yang lebih sejahtera. Konsep pembangunan ekonomi lokal diharapkan mampu menangani perubahan-perubahan fundamental yang lebih bersifat transformatif, memberdayakan sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan, dan meningkatkan kegiatan perekonomian lokal. Ciri atau sifat utama suatu pembangunan yang berorientasi atau berbasis ekonomi lokal adalah menekankan pada kebijaksanaan pembangunan pribumi (*endogenous development policies*) yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia lokal, sumber daya institusional lokal, dan sumber daya fisik lokal. Orientasi ini menekankan pada pemberian prakarsa lokal (*local initiatives*) dalam proses pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara luas.

Pengembangan ekonomi lokal dapat diwujudkan dengan mendorong berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi produktif dengan mengoptimalkan faktor-faktor kunci pengembangan kawasan yang berdaya saing dengan tetap menekankan kepada inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah dan atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat (*community based-groups*) dalam mengelola sumber daya adalah berupaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi daerah.

Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Klaster

Konsep klaster sebagai salah satu strategi pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan di beberapa negara. Klaster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga, yang bersaing, bekerjasama, dan saling tergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam satu wilayah tertentu, dalam bidang aspek unggulan tertentu. Pengembangan wilayah berbasis klaster memberikan fokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku dalam suatu jaringan kerja produksi, sampai kepada jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Pada umumnya motor penggerak dalam pengembangan wilayah berdasarkan klaster adalah sektor industri. Adapun tujuan dari pengembangan wilayah berbasis klaster adalah : (1) memperoleh manfaat kesejahteraan, kesempatan kerja, dan ekspor; (2) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat; (3) berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional; (4) berkembangnya infrastruktur pendukung; (5) berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerjasama, dengan biaya

transaksi yang rendah; (6) tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya; (7) berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan

Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. kluster yang berhasil adalah kluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. kluster pada wilayah atau kawasan yang berhasil memiliki karakteristik adanya spesialisasi, jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan dan serta pendidikan, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi. untuk mengembangkan kluster, perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu: (1) memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan; (2) menjalin kerjasama; (3) mengelola dan meningkatkan pelayanan; (4) mengembangkan tenaga ahli; (5) mendorong inovasi dan kewirausahaan; dan (6) mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan.

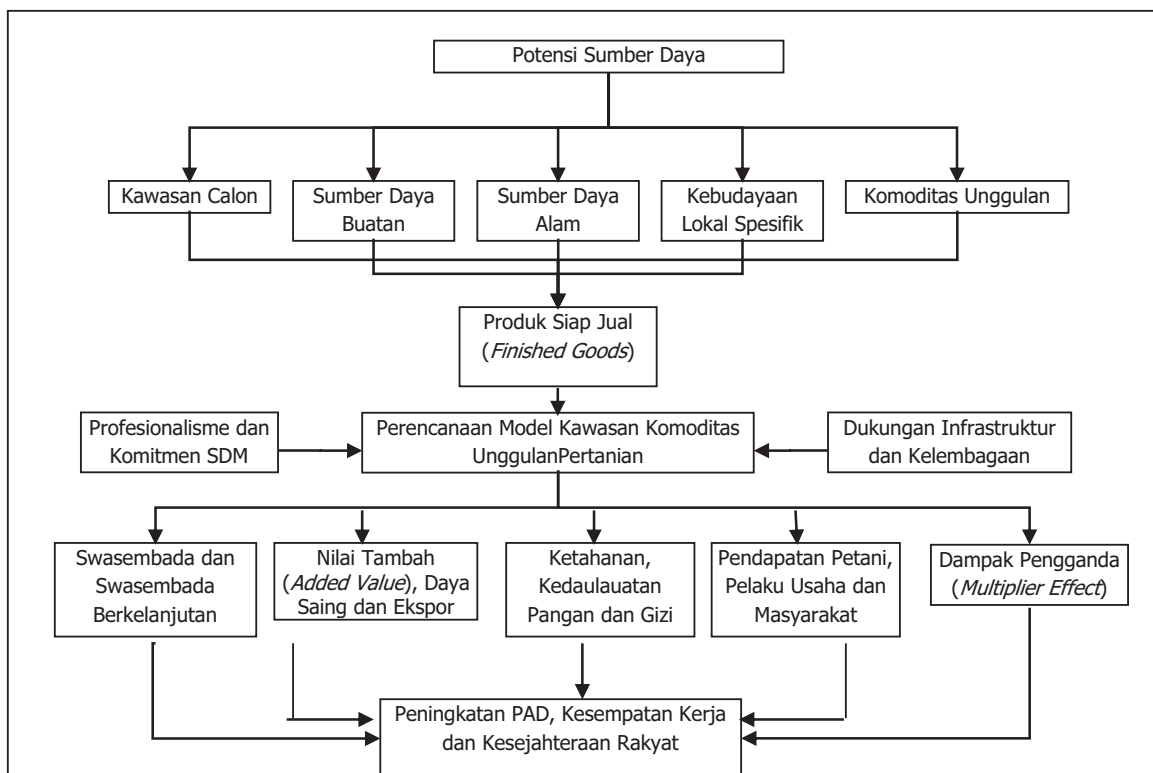
PENGEMBANGAN KOMODITAS PERTANIAN BERBASIS KAWASAN

Pembangunan pertanian pada intinya harus merupakan penjabaran dari visi pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional, yaitu: (1) berlandaskan pada azas ekonomis, efisien, efektif dan transparan; (2) berbasis kinerja yang berorientasi *outcome*; (3) berhorizon pengeluaran jangka menengah; (4) berdimensi wilayah; (5) dilaksanakan dalam kerangka otonomi daerah; (6) dirancang dengan mengakomodasi pendekatan politik, *top-down policy* dan *bottom-up planning*; dan (7) disusun secara teknokratis dan berbasis pada penataan ruang. Berdasarkan visi tersebut, pengembangan komoditas pertanian dengan basis wilayah atau kawasan sangat diperlukan mengingat berbagai pertimbangan seperti uraian berikut.

Pertama pembangunan pertanian memiliki keterkaitan erat dengan ketetapan tata ruang dan wilayah yang mengarahkan dimana lokasi kawasan budidaya, termasuk kawasan budidaya untuk pengembangan komoditas pertanian.

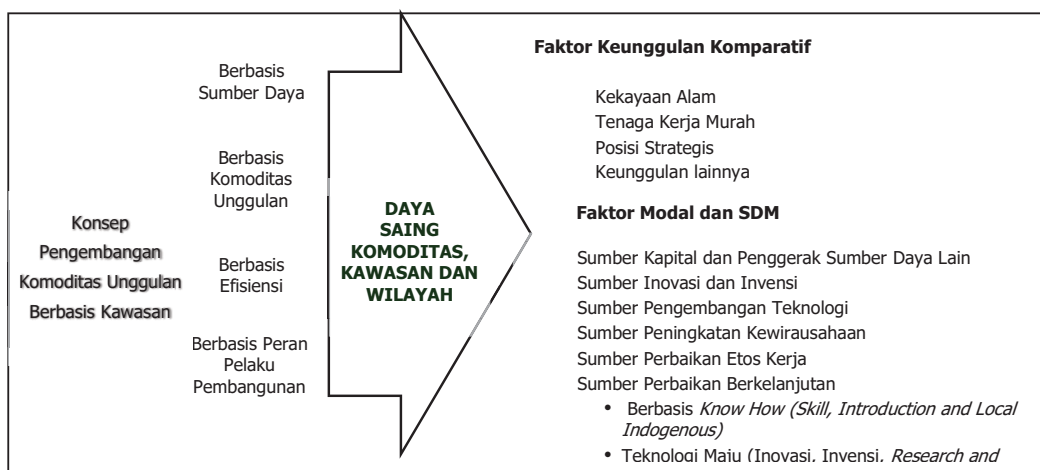
Kedua perencanaan, model pengembangan dan strategi pengembangan kawasan pertanian memiliki arah dan tujuan tertentu sehingga maksimalisasi faktor-faktor internal dan eksternalnya didalam kawasan pertanian dapat menciptakan nilai tambah maupun dampak pengganda untuk meningkatkan pendapatan daerah, kesempatan kerja maupun kesejahteraan rakyat seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1.

Ketiga keterbatasan anggaran pembangunan menyebabkan pemerintah pusat dan daerah perlu memilih usaha pertanian mulai dari hulu hingga hilir yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Penetapan prioritas tersebut perlu dilakukan agar kegiatan pembangunan pertanian dapat lebih fokus yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan.



Gambar 1. Kerangka Pengembangan Kawasan Pertanian Dalam Rangka Pencapaian Empat Target Sukses Kementan dan Pembangunan Ekonomi Daerah (Gumbira, *et al.*, 2004; Setiyanto, 2009; 2010a; 2011a: Disesuaikan)

Keempat, pembangunan pertanian dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan diantaranya berbasis pada faktor-faktor sumber daya. Faktor sumber daya dapat meliputi kekayaan alam, tenaga kerja, lokasi strategis untuk pengembangan komoditas tertentu, penguasaan modal, teknologi. Apabila pengembangan kawasan pertanian dilakukan dengan berlandaskan pada keunggulan faktor-faktor tersebut, maka kemampuan untuk memiliki daya saing dapat diperoleh seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Konsep Perbaikan Dalam Upaya Pengembangan Kawasan Pertanian (Bappenas, 2006a, 2005; Daryanto, 2003; Gumbira, 2006; Setiyanto, 2011a: Disesuaikan)

Kelima setiap kawasan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan banyak alternatif komoditas. Agar pengembangan komoditas pertanian dapat lebih fokus maka diperlukan penentuan komoditas prioritas yang merupakan pilihan para stakeholder.

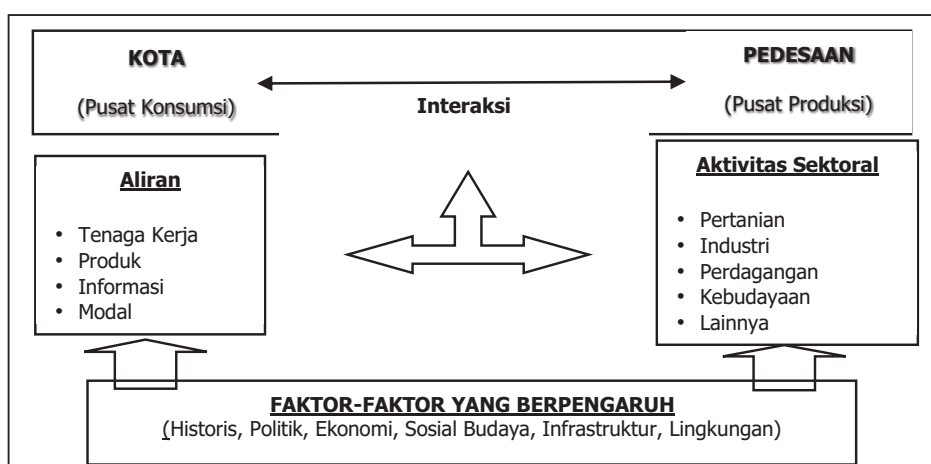
Keenam setiap wilayah atau kawasan memiliki karakteristik tertentu yang sesuai atau tidak sesuai untuk pengembangan komoditas pertanian tertentu. Oleh karena itu pengembangan komoditas pertanian perlu difokuskan pada kawasan yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan komoditas yang dikembangkan. Kesesuaian karakteristik wilayah dan komoditas tersebut tidak hanya dipandang dari segi agroekosistem yang memungkinkan pertumbuhan tanaman pertanian secara optimal tetapi harus mempertimbangkan aspek lainnya seperti ketersediaan infrastruktur pendukung, ketersediaan teknologi hulu hingga hilir, skala penguasaan lahan, skala potensi wilayah, dan aspek lainnya yang relevan dengan komoditas yang dikembangkan.

Ketujuh pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang memiliki orientasi jangka panjang. Oleh karena itu pengembangan komoditas pertanian di setiap wilayah atau kawasan seyogyanya dilandasi dengan visi dan misi yang jelas yang selanjutnya dijadikan landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang.

Kedelapan setiap kawasan memiliki siklus pertumbuhan, mulai dari kawasan embrio hingga kawasan yang telah berkembang. Setiap siklus memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda, sehingga penanganan pengembangan kawasan pertanian perlu dilaksanakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Terkait dengan tahap perkembangan kawasan secara umum terdapat tiga tahapan perkembangan kawasan yaitu (Wirabrata, 2000; Setiyanto, 2004): (1) Fase *start-up*, (2) Fase *pilot* dan (3) Fase *diffusi*.

Kesembilan dalam rangka efisiensi kegiatan pembangunan pengembangan kawasan pertanian perlu disinerjikan dengan pengembangan berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh kementerian lain dan bersifat saling melengkapi. Misalnya, pengembangan kawasan hortikultura dapat disinerjikan dengan pengembangan kawasan pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata. Begitu pula pengembangan kawasan jagung dapat disinerjikan dengan pengembangan kawasan sapi potong dan pengembangan industri pakan ternak atau industri agro lainnya yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian.

Kesepuluh, pengembangan kawasan memiliki keterkaitan dan interaksi antar wilayah dalam kerangka pengembangan perekonomian. Kawasan komoditas unggulan memiliki sistem rantai distribusi dan pemasaran yang cenderung panjang dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi, dari wilayah sumber input ke lokasi kawasan. Sistem ini menyangkut distribusi logistik atau angkutan barang dan proses penanganan komoditas yang membutuhkan waktu yang lama. Keterkaitan dan interaksi antar wilayah dalam pengembangan kawasan dihadapkan pada kondisi infrastruktur transportasi (jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandar udara, dan lain-lain), listrik dan telekomunikasi (jaringan telepon dan internet) ketersediaannya dan lain-lain sangat diperlukan dalam kondisi baik dan merata. Daerah penghasil bahan baku memasarkan komoditas unggulan maupun produk-produk hasil olahan terkait ke daerah-daerah yang melalui proses transformasi dan konversi mampu memberikan nilai tambah dan keunggulan kompetitif secara lebih baik. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan yang jelas bahwa perubahan struktural pada masyarakat sekitar kawasan sangat dipengaruhi oleh fungsi dan peranan kota dan daerah lain sebagai penyedia jasa dan tenaga kerja, pasokan produksi, pasar, industri manufaktur, maupun informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut (Setiyanto, 2011a). Pengembangan kawasan akan memberikan hasil perbaikan perekonomian yang optimal apabila terdapat kesesuaian dalam proses interaksi yang efektif antar kota (pusat konsumsi) dan pedesaan yaitu kawasan komoditas unggulan atau pusat produksi (Gambar 3).



Gambar 3. Kerangka Kerja Konseptual Interaksi Antar Wilayah dalam Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan (Gumbira, *et al.*, 2004; Setiyanto, 2009; 2010a; dan 2011a: Disesuaikan).

Adanya interaksi antar wilayah dikaitkan dengan proses peningkatan daya saing melalui maksimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif industri dan bisnis komoditas unggulan, para pelaku usaha dalam kawasan sentra produksi perlu mempelajari tiga elemen penting penyusunan konsep pengembangan strategi bisnis di masa depan, konsep kebijakan pengembangan dan penerapan model pengembangan kawasan komoditas unggulan. Berdasarkan konsep ini pendekatan pengembangan kawasan komoditas unggulan dilakukan melalui pendekatan klaster (berbasis klaster). Berdasarkan pendekatan klaster ini, dalam pelaksanaannya, pengembangan kawasan lebih ditujukan pada pembentukan dan penggabungan sentra-sentra komoditas unggulan yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga dengan menjalankan fungsinya sebagai penggerak dan pendorong utama percepatan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, pengembangan kawasan diharapkan dapat menstimulasi industri hulu dan hilir secara lebih baik. Hal tersebut yang perlu dijadikan dasar pertimbangan pengembangan kawasan secara terpadu, sehingga pelaksanaannya pun seharusnya dilakukan dengan berorientasi kepada produksi yang diarahkan pada penciptaan keterkaitan antara proses produksi, pengolahan dan pemasaran sebagai satu kesatuan sistem (Setiyanto, 2011a).

Melalui pendekatan klaster pengembangan dan pembangunan komoditas unggulan mampu mewujudkan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Pendekatan ini akan berhasil apabila didukung dengan pendekatan sistem agribisnis mulai dari subsistem hulu hingga hilir dan seluruh subsistem terkait, pendukung dan penunjangnya. Dalam pembangunan pertanian masa lalu, pendekatan ini lebih dikenal dan populer sebagai pendekatan terpadu. Pengembangan kawasan dengan pendekatan terpadu pernah diuji keberhasilannya dalam program pencapaian swasembada beras, pengembangan industri gula, pengembangan komoditas perkebunan berorientasi ekspor dan pengembangan industri perunggasan.

PENUTUP

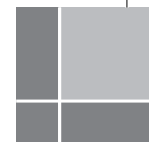
Pendekatan pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian adalah pendekatan terpadu berbasis klaster agribisnis dan perlu dikaitkan dengan pencapaian empat target sukses Kementan, dan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara umum konsep pendekatan operasional pengembangan kawasan pertanian dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) setiap kawasan harus memiliki spesialisasi dan kompetensi inti dalam

pengembangan komoditas unggulan masing-masing; (2) terdapat kegiatan subsektor hulu dan hilir yang dapat menjadi pendorong pengembangan komoditas unggulan yang memiliki kemampuan daya saing; (3) mempunyai keterkaitan antara pengembangan subsistem usahatani komoditas dengan subsistem agribisnis hulu dan hilir, serta penunjangnya; (4) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang memiliki nilai tambah dan kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah; (5) memiliki fokus pengembangan kepada produk yang berdaya saing dan berorientasi pada pasar regional, nasional dan ekspor dalam rangka swasembada, swasembada berkelanjutan maupun ekspor; (6) memiliki sinergitas antar program, antar kawasan dan antar wilayah; (7) perlunya peran pemerintah sebagai katalisator dan fasilitator; (8) perlunya dukungan penempatan kawasan komoditas unggulan dalam tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan yang dilandasi oleh Permentan No 50/2012. Pengembangan kawasan dimaksudkan untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun wilayah, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani. Pengembangan kawasan komoditas unggulan merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah, maka model pengembangan kawasan komoditas unggulan sangat-sangat terkait erat dengan pengembangan kawasan nasional. Pengembangan kawasan komoditas unggulan perlu dipadukan dengan kawasan lain dan implementasi pengembangannya merupakan kawasan terpadu dari berbagai kawasan. Berdasarkan hal ini, pengembangan kawasan komoditas unggulan merupakan bagian tak terpisahkan dengan pengembangan berbagai kawasan lain pada masing-masing kabupaten/kota.

Pendekatan dan implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan memerlukan pengkajian yang mendalam dan memerlukan penetapan pola dan pendekatan pengembangan yang tepat dan implementasi membutuhkan organisasi pengelola dan proses tahapan yang harus dilalui agar kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian telah dirintis dan dikembangkan sejak lama, telah ada contoh dan bukti yang berhasil. Namun demikian terdapat pula kawasan yang baru dan perlu dibentuk untuk pengembangannya. Selain kawasan komoditas pertanian, terdapat pula kawasan-kawasan lain yang telah eksis, telah berkembang atau baru dibentuk di masing-masing kabupaten/kota. Pengembangan kawasan komoditas unggulan pertanian perlu dipadukan dengan kawasan lain dan implementasi pengembangannya merupakan kawasan terpadu dari berbagai kawasan. Berdasarkan hal ini, pengembangan kawasan komoditas unggulan merupakan bagian tak terpisahkan dengan pengembangan berbagai kawasan lain pada masing-masing kabupaten/kota. Mengingat tingkat perkembangan pada masing-masing kabupaten/kota berbeda dan berbeda pula jenis kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan. Intervensi pemerintah untuk mengembangkan kawasan pertanian akan berbeda antara kawasan yang masih tumbuh dengan kawasan yang telah berkembang atau mantap. Ketepatan intervensi pada masing-masing akan menentukan tingkat keberhasilan pengembangan kawasan.

Seyogyanya, pada setiap kawasan yang akan dikembangkan dilakukan kajian prioritas komoditas, dilakukan pengkelasan kawasan tersebut agar diketahui apakah kawasan yang dikembangkan masih tahap penumbuhan, pengembangan, pemantapan atau sudah tahap replikasi dan perluasan. Di samping itu tahap-tahap pengembangan yaitu (1) Fase *start-up*, (2) Fase *pilot*, dan (3) Fase *diffuse* perlu dilakukan sebelum dilakukan eksekusi pengembangan pada suatu kawasan tertentu dan dilanjutkan secara besar-besaran. Belanja dari keberhasilan masa lalu, organisasi yang bertanggungjawab mulai dari pusat hingga lokasi



perlu dibentuk agar arah utama kebijakan pengembangan kawasan dan proses pengembangannya sejalan dengan tujuannya. Organisasi tersebut seyogyanya bersifat permanen, merupakan gerakan massal dan dipimpin langsung oleh Presiden dengan penanggungjawab operasional adalah Menteri Pertanian. Sebagai gerakan massal, organisasi perlu dibentuk mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga lokasi dimana kawasan komoditas unggulan dikembangkan. Implementasi pengembangan kawasan komoditas unggulan dapat dilaksanakan secara utuh, sistematis, terintegrasi atau terpadu, terkoordinasi dan terkelola dengan baik. Selain mobilisasi sumber daya secara besar-besaran dan fokus, partisipasi aktif para pemangku kepentingan mulai dari pusat hingga daerah hingga pada unit terkecil pemerintahan atau desa sangat diperlukan.

Perencanaan pengembangan kawasan pertanian merupakan suatu bentuk pengkajian yang dilakukan secara sistematis dari berbagai aspek yang ada dalam maupun yang terkait dengan pengembangan kawasan pertanian. Analisis perencanaan pengembangan kawasan pertanian merupakan tahap awal dari serangkaian proses dan kegiatan pembangunan yang akan menentukan keberhasilan pembangunan pertanian pada kawasan yang dipilih. Pembangunan pertanian memiliki ciri khas dimana proses produksi sangat terkait dan berbasiskan kondisi agroekosistem tertentu yang menjadi suatu ciri dari suatu wilayah. Hal ini menyebabkan usaha budidaya dan produksi pertanian memiliki kekhususan yang berbeda dengan produksi sektor lainnya. Dalam pembangunan wilayah, agar keuntungan komparatif dan kompetitif dapat dieksploitasi dan dapat dikembangkan secara optimal, maka karakteristik wilayah yang khas baik dari aspek geografis, sosial ekonomi budaya dan demografis, maupun agroekologis harus menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pengembangan wilayah. Unsur keterpaduan mengarahkan bahwa pada akhirnya dalam pengembangan wilayah membutuhkan pengaturan ruang secara terpadu melalui proses pemanfaatan sumber daya alam secara sinergi dengan pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, kelembagaan, teknologi dan lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2005. Pengembangan Kawasan Peternakan. Fokus dan Kegiatan Survei. Bulletin Kawasan Edisi 5 Tahun 2005 : 7 - 28.
- Badan Agribisnis. 1998. Rencana Induk (Master Plan) Badan Agribisnis Dalam Repelita VII. Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. Jakarta.
- _____. 1998a. Peluang Investasi Agribisnis. Badan Agribisnis. Jakarta.
- _____. 1999. Analisis Kebutuhan Pada Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU) Menurut Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Badan Agribisnis, Departemen Pertanian. Jakarta.
- _____. 1999a. Agribusiness Investment Opportunity. Badan Agribisnis. Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2006. Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputy Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS. Jakarta.
- _____. 2006a. Panduan Pembangunan Klaster Industri Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah Berdaya Saing Tinggi. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Jakarta.
- _____. 2005. Kajian Strategi dan Arah Kebijakan Untuk Memaksimalkan Potensi Daya Saing Daerah. Laporan Akhir. Direktorat



Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.

_____. 2004. Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.

_____. 2003. Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program Dalam Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan. Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS. Jakarta.

Beirlein, G James, Dchneeberger, C Kenneth and Osburn, D Donald. 1986. Principles of Agribusiness Management. Prentice Hall Englewood Clifs. New Jersey.

Blakely, E.J. 2002. *Planning Local Economic Development*. Sage Publication. London.

Bregman EM, Feses EJ. 2003. *Industrial and Regional Cluster Concept and Competitive Applications*. The Web Book of Regional Science.

Center For Agro Economic Research. 1990. Comparative Advantage and Protection Structures of The Livestock and Feedstuff Subsectors in Indonesia. Editors F. Kasryno dan P. Simatupang. Agency for Agricultural Research and Development.

Daryanto, A.2003. Teknik Pengkajian Sumber daya Dalam Mengembangkan Potensi Ekonomi Lokal dan Regional. Makalah Diklat Manajemen Pembangunan Ekonomi dan Usaha Daerah, Jakarta, 28 April – 3 Mei 2003. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

David, F.R. 2001. *Strategic Management*. Prentice Hall, New Jersey.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan.1999. Strategi Pembangunan Jangka Menengah (1999 – 2004) Industri Kecil dan Menengah. Buku I dan II. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 1999a. Strategi Pembangunan Jangka Menengah (1999 – 2004) Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta.

Dinc, M. 2002. *Regional and Local Economic Analysis Tools*. The World Bank. Washington DC.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang. 2002. Pedoman Pengelolaan Ruang Kawasan Sentra Produksi Pangan Nasional Dan Daerah (Agropolitan). Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah www.penataanruang.net/taru/nspm/6.pdf

Downey, WD and Erickson, SP. 1989. Manajemen Agribisnis Edisi Kedua (Bahasa Indonesia). Erlangga. Jakarta.

Gumbira Sa'íd, E., 2006. Modul Globalisasi dan Tantangan Peningkatan Daya Saing Industri Pangan Dan Pertanian Melalui Kinerja Mutu. Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Hamel, G. dan Prahalad, CK. 1990. *The Core Competence of the Corporation*. Harvard Business School Press. Boston. Review: May-June.

Hamel, G. dan Prahalad, CK.. 1994. *Competing for the Future*. Harvard Business School Press. Boston.

Hanafiah, T. 1999. Studi Potensi Wilayah Pedesaan Provinsi Jawa Barat dan Bengkulu. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Proyek

Pengkajian Teknologi pertanian Partisipatif Pusat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.

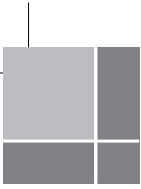
- Hartarto, A. 2004. *Strategi Clustering dalam Industrialisasi Indonesia*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Hartoyo, S., D. Rachmina dan A. Fariyanti. 1997. Pemantapan Konsep Dasar Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Biro Perencanaan Departemen Pertanian. Bogor.
- _____. 1999. Studi Potensi Wilayah Pedesaan Provinsi Jawa Barat dan Bengkulu. Kerjasama antara Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor dengan Badan Penelitian Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Japan International Cooperation Agency.2003. *Studi Mengenai Peningkatan Kapasitas Kluster Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia*. Laporan Perkembangan. KRI International Corp. Tokyo.
- Joesoef, S. 2000. GPAP, An Alternative Method for MCDM. Paper Presented on "The Indonesian Symposium on The Analytic Hierarchy Process. INSAHP 2000. Lembaga Manajemen PPM. Jakarta, August 23 - 24 2000.
- Juzar, A. 2006. *Model Strategi Pengembangan Kluster Agroindustri Unggulan Menggunakan Kompetensi inti di Daerah Kabupaten dan Kota Bogor*. Disertasi Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2015. Cetakan1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.
- Kementerian Pertanian. 2010. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 – 2014. Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. Jakarta.
- Koizumi, H. 2003. *Strengthening Capacity of SME Clusters: Master Concept and Strategy for SME Cluster Development from Lessons Learn*. JICA Study Team.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254).
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833).
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106).
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260).
- Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296).
- Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2009-2014.

- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press. New York
- _____. 1993. *Keunggulan Bersaing : Menciptakan dan Mempertahankan Kinerja Unggul*. (Edisi Indonesia). Penerbit Erlangga. Jakarta.
- _____. 1996. Competitive Advantage, Agglomeration Economies and Regional Policy. *International Regional Science Review*, 19, 85-90.
- _____. 1998. "Clusters and the New Economics of Competition." *Harvard Business Review*. 77-90.
- _____. dan S. Stern. 1999. *The Challenge to America's Prosperity : Findings from the Innovation Index*. Council of Competitiveness. Washington, D.C.
- _____. 2000. "Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy." *Economic Development Quarterly* 14 (1): 15-34.
- _____. 2003. "The Economic Performance of Regions." *Regional Studies* 37 (6/7): 549-578.
- _____. 2007. *Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing (Edisi Indonesia)*. Karisma Publishing Group. Tangerang.
- Prawirokusumo, S. 2005. Masalah dan Prospek Pembangunan Peternakan di Indonesia. Pengembangan Kawasan Peternakan. *Bulletin Kawasan Edisi 5 Tahun 2005* : 2 – 6.
- Pusat Studi Asia Pasifik. Tanpa Tahun. Laporan Akhir Rancangbangun Sistem Informasi Geografis untuk Menunjang SPAKU (Sentra Pengembangan Agribisnis Komoditi Unggulan). Biro Perencanaan Departemen Pertanian Jakarta dengan Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rosenfeld, S.A. 2002. "*Creating Smart Systems : A guide to cluster strategies in less favoured regions*", Regional Technology Strategies, North Carolina.
- Setiyanto, A. 2010. Konsepsi Model Pembangunan Ekonomi Wilayah Daerah Perbatasan Perbatasan Negara. Roundtable Discussion. Lembaga Pertahanan Nasional 4 Desember 2010. Lembaga Pertahanan Nasional. Jakarta.
- Setiyanto, A. 2011. Analisis Special Safeguard Mechanism Komoditas Pangan Utama Indonesia Dalam Perjanjian World Trade Organization. Thesis. Sekolah Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- _____. 2011a. Konsep Klaster. Aplikasi Pada Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Dalam Rangka Pembangunan Pertanian Berkelanjutan. Pertemuan Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Bogor, 18 – 21 Mei 2011. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Kementerian Pertanian. Jakarta.
- _____. 2011b. Bahan Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian: Bab II dan Bab III. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal. Kementerian Pertanian. Jakarta.



- Setiyanto, A., B. Irawan dan B. Prasetyo. 2011. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan dan Wilayah Sentra Pengembangannya Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Komoditas Unggulan Pertanian. Kumpulan Materi Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian 2011. Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Jakarta
- Setiyanto, A., R. S. Rivai, J. Situmorang, M. Azis, Y.S. Saputra dan J. Triyono. 2012. Kajian Pengembangan Komoditas Strategis Berbasis Kawasan. Laporan Penelitian. Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Siebert, H. 2000. The Paradigm of Locational Competition. Kiel Discussion Papers 367.
- Siregar, M., A. Setiyanto, Y. Supriyatna dan E. Ariningsih. 2003. Analisis Penentuan Komoditas Unggulan dan Wilayah Sentra Pengembangannya. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Solvell, O, Lindqvist, G and Ketels, C. 2003. The Cluster Initiative Greenbook. Ivory Tower AB. Stockholm. www.cluster-research.org
- Sunarno. 2004. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah. Kementerian Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Jakarta.
- Suprpto, A. 1999. Pengembangan Komoditas Pertanian Ungguan Dalam Upaya Memasuki Pasar Global. Makalah Disampaikan pada Lokakarya Nasional dan Musyawarah Nasional V Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (POPMASEPI) IMASEP - FP USU MEDAN.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4725).
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170).
- Winoto, Joyo. 1995. Perwilayahan Komoditas Pertanian Berdasarkan Aksesibilitas Lokasi Produksi. Paper disampaikan pada Pelatihan Perwilayahan Komoditas Pertanian





Berdasarkan Ketersediaan Tenaga Kerja dan Aksesibilitas. Biro Perencanaan Pertanian. Departemen Pertanian RI. Denpasar-Bali. 28 Agustus – 2 September 1995.

_____. 1996. Pengembangan Agroecological Zones dalam Perspektif Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Paper Disampaikan Pada Pelatihan Apresiasi Metodologi Delinilasi Agroecological Zones. Bogor, 8 – 17 Januari 1996.

_____. 1997. Pedoman Analisis Pewilayahan Komoditas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Wirabrata, H. 2000. Pengembangan Klaster Industri Antara Teori dan Praktek. Departemen Perindustrian. Jakarta.

Yoshimura, T. 2004. *Sustainable Local Development and Revitalization: Case of One Villae One Product Movement: Its Principles and Implications*. United Nations Centre for Regional Development (UNCRD).[http://www.uncrd.or.jp].